

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI  
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA  
BAGI HASIL (DBH), DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :  
ANINDYA KURNIASARI  
B 200 150 377**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2019**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI  
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL  
(DBH), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI  
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode  
2014-2016)**

### **PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh:**

**ANINDYA KURNIASARI**  
**B 200 150 377**

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



**(Dra. Mujiyati M.Si)**

## HALAMAN PENGESAHAN

### **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI**

**(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode  
2014-2016).**

Yang ditulis oleh:

**ANINDYA KURNIASARI**

**B 200 150 377**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal 7 Februari 2019

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dra. Mujiyati M.Si  
(Ketua dewan penguji)
2. Fauzan SE., M.Si  
(Anggota dewan penguji)
3. Drs. M. Abdul Aris, M.Si  
(Anggota dewan penguji)

(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Dr. Syamsudin, M.M.**

NIP. 195702171986031001

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 26 April 2019

Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'K' followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

**ANINDYA KURNIASARI**  
**B200150377**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Povinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, alokasi dana umum, alokasi dana khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Populasi dalam penelitian ini adalah 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah untuk periode 2014-2016 dan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, laporan realisasi anggaran dan harga konstan PDRB. Metode analisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi; dana alokasi khusus dan belanja modal tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Alokasi Dana Reneral, Alokasi Dana Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal

**Abstract**

The purpose of this study is to understand the influence of region original revenue, general fund allocation, specific fund allocation, revenue sharing fund, and capital expenditure to economic growth. The population in this study were 35 regencies/cities in Central Java for periods of 2014-2016 and . The data used in this research is secondary data obtained from the document of Badan Pusat Statistik of Central Java Province, the budget realization report and GDRPat constant prices. The analytical method used multiple linear regression analysis. The results show that region original revenue, general fund allocatio, and revenue sharing fund has effects on the economic growth; specific fund allocation and capital expenditure has no effects on the economic growth.

**Keyword:** Economic Growth, Region Original Revenue, Reneral Fund Allocation, Specific Fund Allocation, Revenue Sharing Fund, and Capital Expenditure

## **1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan baru mengenai otonomi daerah yakni dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Di harapkan dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat lebih pemeratakan pembangunan sesuai dengan keinginan daerah untuk mengembangkan wilayah menurut potensi masing-masing (Rasita, Daisy, George, 2017).

Tujuan otonomi daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Salah satu ukuran pertumbuhan ekonomi daerah adalah pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Pendapatan domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dapat menunjukkan seberapa besar aktivitas perekonomian secara keseluruhan (Hapid, Muhammad, dan Yuli, 2015). Rahmah (2017) menyatakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada sutau daerah dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkat apabila pemerintah dapat memberikan infrastruktur yang memadai. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih mensejahterakan masyarakat. Peningkatan pembangunan infrastruktur di sektor publik dipandang perlu dilakukan agar fasilitas publik dan penunjang lainnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan akan menarik investor untuk berinvestasi serta membuka usaha di daerah, tentunya hal tersebut akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di daerah (Putu, Dwirandra, 2014).

Hasil penelitian Ni Wayan (2017) menunjukkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan bahwa “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatanyang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan.”Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah (Halim, 2004 :67).Menurut Mamesah (1995) dalam Ni Wayan (2017) menyatakan besarnya PAD menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan memelihara serta mendukung hasil-hasi lpembangunan yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa yangakan datang.Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 6, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Besarnya PAD dapat mencerminkan tingkat kemandirian pemerintah daerah, dimana daerah lebih fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai agenda melalui belanja pembangunan/infrastruktur dan belanja lainnya. Tingkat Pendapatan Asli Daerah akan berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah

maka akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang akan dilakukan oleh suatu daerah, dengan meningkatnya aktivitas daerah maka akan meningkatkan output daerah berupa barang dan jasa yang akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi di daerah juga ikut meningkat.

Disamping PAD, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Marianus (2016) mengatakan bahwa DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan dan fungsi dana alokasi umum (DAU) untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. DAU memberikan kontribusi terbesar dalam Dana Perimbangan.

Dana Alokasi Umum diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Selain untuk memenuhi belanja operasional daerah, dana alokasi umum juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Semakin besar dana alokasi umum yang diterima dan semakin besarnya pengalokasian dana alokasi umum untuk pembangunan infrastruktur maka pelayanan kepada publik akan semakin baik yang diharapkan akan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Marianus, Rudy (2016) mengatakan pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang, dan tidak termasuk penyertaan modal. Dengan DAK, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang (Marianus, Rudy, 2016). Dengan demikian, semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh suatu daerah akan meningkatkan

infrastruktur yang kemudian akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada publik. Hal ini akan berdampak kepada barang dan jasa yang dihasilkan daerah yang akan diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Marianus (2016) mengatakan bahwa DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin* (daerah penghasil) dan penyaluran berdasarkan realisasi penerimaan. Dana Bagi Hasil diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah daerah sesuai dengan hasil dan realisasi penerimaan dari daerah tersebut, sehingga Dana Bagi Hasil setiap daerah berbeda.

Pemerintah pusat akan memberikan dana bagi hasil kepada daerah yang memiliki kekayaan daerah yang tinggi dan dana penerimaan pajak pusat yang tinggi. Dengan besarnya dana bagi hasil, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah dapat lebih mengeksplor dan meningkatkan aktivitas produksinya. Dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengelola kekayaan daerah yang dimiliki sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin yang berdampak pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Modal menurut PSAP Nomor 2, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (Agung Priambodo, 2015). Belanja modal antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Belanja modal bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana fasilitas publik yang dapat menjadi penunjang terlaksana berbagai aktivitas ekonomi masyarakat. Belanja modal mempunyai pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan akan memiliki daya dalam menggerakkan roda perekonomian daerah (Desak, Putu, dan Nil Uh, 2017). Sehingga belanja modal yang besar akan memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan daerah semakin memiliki kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian, hal ini akan berdampak kepada meningkatnya pendapatan perkapita dan meningkatnya barang dan jasa hasil aktivitas ekonomi yang kemudian akan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi.



Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Wayan dan I Dewa (2017) yang berjudul. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada. (1) Objek penelitian, yaitu pemerintahan daerah kabupaten/Kota di Jawa Tengah (2) tahun penelitian, menggunakan tahun perbandingan anggaran 2014-2016 (3) menambahkan variabel independen yaitu belanja modal.

## 2. METODE

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015: 167). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten/Kota yang tadapat di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tesebut (Sugiyono, 2015: 168). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, purposive sampling adalah sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang ditentukan. Kriteria pemilihan sampel sebagai berikut :

- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan laporan PDRB secara berturut-turut antara tahun 2013-2016
- Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan LRA secara lengkap dan jelas berturut-turut antara tahun 2014-2016
- Laporan Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah diaudit oleh BPK

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah LRA antara tahun 2014-2016 yang diakses melalui wesite [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013-2016 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang dapat diakses meelalui website [www.bps.jateng.go.id](http://www.bps.jateng.go.id).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil

#### 3.1.1 Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
Kolmogorov-SmirnovZ	0,709
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,697

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Berdasarkan uji normalitas diatas, didapatkan bahwa Asymp Sig menunjukkan hasil sebesar 0,697 atau 69,7 % hal ini menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal, karena nilainya lebih besar dari 0,05 atau 5%.

### 3.1.2 Uji Mulltikolinearitas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			
Pendapatan Asli Daerah	0,458	2,182	Tidak terjadi Multikolinearitas
Dana Alokasi Umum	0,525	1,907	Tidak terjadi Multikolinearitas
Dana Alokasi Khusus	0,795	1,258	Tidak terjadi Multikolinearitas
Dana Bagi Hasil	0,588	1,700	Tidak terjadi Multikolinearitas
Belanja Modal	0,340	2,943	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat satu Variabel independen yang memiliki nilai VIF yang lebih besar dari 10 dan nilai tolerance yang memiliki nilai diatas 0,010, hal ini berarti bahwa model regresi terbebas dari adanya korelasi yang tinggi antara Variabel independen sehingga kesimpulannya adanya model terbebas dari multikolinearitas.

### 3.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	T	Sig.	Keterangan
(Constant)			
Pendapatan Asli Daerah	0.794	0,429	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Dana Alokasi Umum	0,541	0,590	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Dana Alokasi Khusus	0,055	0,956	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Dana Bagi Hasil	0,108	0,914	Tidak Terjadi Heterokedastisitas
Belanja Modal	1,291	0,200	Tidak Terjadi Heterokedastisitas

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Berdasarkan pengujian heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua Variabel independen memiliki nilai diatas 0,05 atau 5%, berarti bahwa model regresi terbebas dari ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari heterokedastisitas.

### 3.1.4 Uji Autokorelasi

Tabel 4 Uji Autokorelasi

Keterangan	Durbin-Watson	Kesimpulan
Pertumbuhan Ekonomi	1,28	Tidak Terjadi Autokolerasi

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Berdasarkan nilai durbin Watson menunjukkan nilai 1,851 berarti angka DW berada diantara angka -2 sampai +2 berarti model regresi tidak menunjukkan adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan pengganggu pada periode t-1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model terbebas dari autokolerasi.

### 3.1.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Uji Hipotesis

Variabel	Coefficients	T	Sig.	Keterangan
(Constant)	0,049			
Pendapatan Asli Daerah	1,579	5,611	0,000	Signifikan
Dana Alokasi Umum	5,315	2,465	0,016	Signifikan
Dana Alokasi Khusus	-2,671	-1,150	0,254	Tidak Signifikan
Dana Bagi Hasil	-8,139	-5,085	0,000	Signifikan
Belanja Modal	-3,312	-1,128	0,381	Tidak Signifikan
F hitung			10,873	
R <sup>2</sup>			0,393	
Adjusted R <sup>2</sup>			0,357	
Sig.			0,000	

Sumber: Hasil Analisis Data 2019

Hasil pengujian diatas menunjukkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$PE = 0,049 + 1,579PAD + 5,315DAU - 2,671DAK - 8,139DBH - 3,312BM + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Koefisien regresi pendapatan asli daerah menunjukkan nilai positif sebesar 1,579 berarti jika semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi.
- Koefisien regresi dana alokasi umum menunjukkan nilai positif sebesar 5,315 berarti jika semakin tinggi dana alokasi umum maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi.
- Koefisien regresi dana alokasi khusus menunjukkan nilai negative 2,671 berarti jika semakin tinggi jumlah dana alokasi khusus maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah.
- Koefisien regresi dana bagi hasil menunjukkan nilai negative 8,139 berarti jika semakin tinggi dana bagi hasil maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah.
- Koefisien regresi belanja modal menunjukkan nilai negative 3,312 berarti jika semakin besar belanja modal maka pertumbuhan ekonomi akan semakin rendah.

### 3.1.6 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model telah fit atau tidak. Hasil dari uji F tersaji dalam tabel 5 menyebutkan bahwa nilai F hitung memiliki nilai sebesar 10,873 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, dikarenakan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal telah menunjukkan fit model.

### 3.1.7 Uji Koefisien Determinasi

Nilai Koefisien determinan pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) dalam tabel 5 menunjukkan nilai sebesar 0,357 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 35,7% kemudian sisanya 64,3% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

### 3.1.8 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis penelitian tentang seberapa jauh pengaruh setiap variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Kriteria yang ditetapkan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis dapat diterima. Berdasarkan tabel 5 didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah menunjukkan nilai 0,000 yang berarti pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi variabel pendapatan asli daerah sebesar 0,000 yang dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.
- b. Nilai signifikansi variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai 0,016 yang berarti dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi variabel dana alokasi umum sebesar 0,016 yang dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima.
- c. Nilai signifikansi variabel dana alokasi khusus menunjukkan nilai 0,254 yang berarti dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi variabel dana alokasi khusus sebesar 0,254 yang dinyatakan lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,005 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak.
- d. Nilai signifikansi variabel dana bagi hasil menunjukkan nilai 0,000 yang berarti dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi variabel dana bagi hasil sebesar 0,000 dinyatakan lebih kecil dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H4 diterima.
- e. Nilai signifikansi variabel belanja modal menunjukkan nilai 0,381 yang berarti belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena nilai signifikansi variabel /luas wilayah hanya sebesar 0,008 dinyatakan lebih besar dari kriteria yang ditetapkan yaitu nilai signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak.

### **3.2 Pembahasan**

#### **3.2.1 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi PAD sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD yang diterima oleh suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan meningkat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD yang tinggi dapat mencerminkan kemandirian suatu daerah, dan kemampuan daerah dalam mengelola potensi daerah tersebut.

Tingginya pendapatan asli daerah menunjukkan pemerintah daerah tersebut dapat mengelola pendapatannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah yang dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat sehingga berdampak pada baiknya kegiatan ekonomi masyarakat. Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh penerimaan PAD suatu daerah, karena daerah dengan potensi PAD yang tinggi dapat memberikan sumbangan yang besar dalam pelaksanaan program-program pemerintah.

Terlaksananya program-program pemerintah dengan baik akan menimbulkan banyaknya aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang dilakukan pada daerah tersebut maka dapat menaikkan tingkat pendapatan dan output produksi yang dihasilkan sehingga pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mohammad (2016) dan Marianus (2016) yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **3.2.2 Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi variabel DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,16 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU yang diterima oleh suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut akan meningkat. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adanya fleksibilitas dalam penggunaan DAU, pemerintah daerah dapat leluasa dalam menggunakan dana ini sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berhubungan secara langsung dengan pertumbuhan

ekonomi seperti pembangunan jalan jembatan sehingga laju pertumbuhan ekonomi juga meningkat sejalan dengan meningkatnya DAU.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmah dan Basri (2016) dan Olvy (2018) bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### 3.2.3 Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi DAK sebesar 0,254 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya dapat dikarenakan adanya rentang yang sangat jauh nilai DAK antara beberapa daerah, yaitu antara Kota Surakarta dan Kabupaten Banyumas, terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan DAK dengan nilai terendah sejumlah Rp 3.750.100.000 terdapat di Kota Tegal dan nilai tertinggi Rp 1.398.539.653.000 terdapat di Kabupaten Banyumas.

Dalam penelitian ini DAK tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan oleh tidak semua kabupaten/kota di Jawa Tengah mendapatkan aliran DAK dari pemerintah pusat dengan porsi yang sama. Karena tujuan awal DAK adalah untuk pemerataan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini kemungkinan DAK tidak dialokasikan kepada belanja yang produktif, akan tetapi dialokasikan pada belanja yang tidak berhubungan secara langsung dengan faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu kemungkinan DAK digunakan untuk belanja infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang bisa jadi tidak menjadi prioritas daerah tersebut sehingga pertumbuhan ekonomi tidak meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Meilita dkk (2016) dan Rosita dkk (2017) bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### 3.2.4 Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi DBH sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa suatu daerah yang mendapatkan transfer DBH yang cukup tinggi akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pula. Dana Bagi Hasil merupakan sumber pendapatan daerah yang sangat potensial dan merupakan modal

dasar pemerintah dalam mendapatkan dana pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari dana PAD, DAU, dan DAK.

Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak pusat dan sumber daya alam. DBH yang ditransfer dari pusat ke daerah, akan digunakan untuk membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah karena pada dasarnya apa yang sudah diambil dan dikelola dari daerah akan dikembalikan lagi ke daerah untuk membantu pelaksanaan pembangunan. Transfer dana perimbangan seperti DBH ini akan sangat membantu bagi peningkatan pelayanan publik. Semakin tinggi pajak pusat yang dipungut daerah dan kekayaan alam daerah maka semakin tinggi pula dana bagi hasil yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Dengan meningkatnya pelayanan publik maka dapat meningkatkan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Rahma dan Basri (2016) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### 3.2.5 Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat signifikansi Belanja Modal sebesar 0,381 lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adanya rentang yang sangat jauh nilai Belanja Modal antara beberapa daerah, yaitu antara Kabupaten Rembang dan Kota Semarang, terbukti dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan Belanja Modal dengan nilai terendah sejumlah Rp 51.980.727.019 terdapat di Kabupaten Rembang dan nilai tertinggi Rp 1.026.716.904.816 terdapat di Kota Semarang.

Dalam penelitian ini belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh belanja modal yang digunakan pemerintah daerah dialokasikan pada belanja infrastruktur yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran, selain itu dapat juga disebabkan hasil alokasi belanja modal belum dapat dinikmati dalam kurun waktu yang pendek/pembangunan infrastruktur masih berjalan sehingga belum memperoleh hasil dari belanja modal tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ni Wayan dan I Dewa (2017) yang menyatakan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_1$  diterima.

- b. Variabel dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,016 < 0,05$ , sehingga H2 diterima.
- c. Variabel dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,254 > 0,05$ , sehingga H3 ditolak.
- d. Variabel dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga H4 diterima.
- e. Variabel Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikansi  $0,381 > 0,05$ , sehingga H5 ditolak.

## 4.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat ditambahkan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, yaitu:

- a. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah populasi penelitian, misalnya se-Pulau Jawa atau bahkan bisa seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, sehingga nanti akan lebih tergeneralisasi.
- b. Peneliti selanjutnya dapat menambah periode sampel yang digunakan dalam penelitian agar lebih efisien.
- c. Menambah lebih banyak variabel untuk penelitian selanjutnya agar mampu mewakili lebih banyak faktor-faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Meilita Lukitasari, dkk. 2016. Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 16 No. 02
- Arsyad, Lincoln. 2010. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Unit Percetakan dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- AR, Rahmah dan Basri Zein. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi. Vol. 1, No. 1
- Astria, Sheilla Andita. 2014. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 12, No.1
- Azis, Mohammad. 2016. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malinau. Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen. Volume 12, (1)



- Dewi, Ni Wayan Ratna dan I Dewa Gede Dharma Saputra. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.18.3
- Halim, Abdul. 2016. Manajemen Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.
- Laranga, Rosita N, dkk. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Halmahera Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Volume 17 No. 01
- Manek, Marianus dan Rudy Badrudin. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Telaah Bisnis. Vol. 17, No. 2
- Jensen, M. C and Meckling, W.h.1976. Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from: <http://papers.ssrn.com>.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Prasetyo, P.Eko. 2009. Fundamental Makro Ekonomi. Yogyakarta: Beta Offset.
- Priabodo, Agung. 2015. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Economic Development Analysis Journal. Vol 4, No. 1
- Talangain, Olvy Betriks, dkk. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Tomohon. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah. Vol.19 No.7
- Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.